

**EVALUASI PENERAPAN STANDARAKUNTANSI PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KABUPATEN JOMBANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Perbankan Dan Keuangan



Oleh :

DWI FITRI LISWIYANI

NIM : 2015410160

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2018**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Dwi Fitri Liswiyani
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 20 Februari 1996
NIM : 2015410160
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

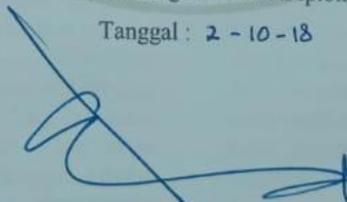
Tanggal : 27-9-18



(Putri Wulanditva, SE., M.Ak., CPSAK)

Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal : 2-10-18



(Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.)

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT
ACCOUNTING STANDARDS ACCRUAL-BASED ON BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD) DISTRICT JOMBANG**

Dwi Fitri Liswiyani

2015410160

2015410160@students.perbanas.ac.id

STIE Perbanas Surabaya

Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK.

NIP : 36110144

STIE Perbanas Surabaya

ABSTRACT

In realizing a system of good governance, the need for changes in the field of government accounting for through the accounting process resulting financial information to various parties. This change should be based on a solid foundation that is the presence of accrual-based SAP. This study aims to determine the extent of accrual-based SAP implementation and employee understanding of the accounting section of the application of accrual-based SAP. Data was collected through interviews and observations. Results Data were analyzed using qualitative descriptive method. Research conducted in BPKAD Jombang, suggesting that employees already understand the accounting and accrual-based SAP began in 2015 BPKAD Jombang already implementing accrual-based SAP in accordance with Permendagri No. 63 of 2013.

Key Words : Application, Government Accounting Standards, Accrual Basis

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik, perlu adanya perubahan dibidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (IKAPI,2009).

Tuntutan-tuntutan masyarakat yang semakin kuat dan adanya dorongan dari lembaga-lembaga Internasional menyebabkan pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki sistem akuntansinya.

Melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 yang menganut basis kas menuju akrual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menganut basis akrual secara penuh. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dibuatkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detail.

Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh. Pentingnya penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam sistem pengendalian intern yang efektif diperlukan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan standar akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan, dampak yang dihasilkan tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Berhasil atau tidak penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah tidak lepas dari peran sumber daya manusia

termasuk pada BPKAD kabupaten Jombang. Dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual permasalahan yang timbul dapat berakibat serius dalam jangka panjang.

Permasalahan yang mungkin timbul yaitu keterbatasan dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki sehingga tidak memiliki cukup pegawai dengan kemampuan akuntansi yang baik, infrastruktur komunikasi dan teknologi yang terbatas dapat membatasi pilihan-pilihan dalam penerapan kebijakan SAP berbasis akrual. Oleh karena itu, penerapan SAP berbasis akrual dilakukan dengan menyusun kebijakan akuntansi akrual, melakukan pelatihan terhadap pengelola keuangan SKPD, menyiapkan SDM yang kompeten melalui pelatihan dan sosialisasi serta penggunaan SIMDA keuangan yang sudah berbasis akrual. Karena itu perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Dukungan yang kuat dari pimpinan menjadi salah satu faktor yang tidak kalah penting, karena hal tersebut merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Karena itu, perlu dilakukan penilaian tentang pemahaman pegawai terhadap SAP berbasis akrual sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

LANDASAN TEORI Akuntansi Pemerintah

Nordiawan, Putradan Rahmawati (2012:4) menjelaskan Akuntansi Pemerintah mengkhhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di Badan Pemerintah. Ghozali dan Ratmono (2008:3) menyatakan bahwa dalam akuntansi pemerintah, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah yang menyangkut organisasi pemerintah dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*non-profit organization*).

Berbasis Akruwal

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2015:11), Basis Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Menurut Jan Hoesada (2015:78), Basis Akruwal merupakan basis akuntansi yang pendapatan diakui saat dihasilkan tanpa perlu memperhatikan penerimaan kas (dapat lebih dahulu, atau arus kas masuk tunai, atau belakangan atau pendapatan kredit), dan beban diakui saat terjadinya beban tanpa perlu memerhatikan pembayarannya (dibayar dimuka, biaya saat tunai, atau biaya timbul walau belum dibayar).

Tujuan Penggunaan basis akruwal

Tujuan dari penggunaan basis akruwal yaitu (a) meningkatkan efisiensi dan efektifitas, (b) meningkatkan pengendalian fiscal, manajemen aset, (c) meningkatkan akuntabilitas penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah, (d) informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, (e) mereformasi sistem anggaran belanja, (f) transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah (Margareta, 2015).

Manfaat basis akruwal

Manfaat dari penggunaan basis akruwal (a) Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah; (b) Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah (c) Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya; (d) Standar yang dapat diterima umum; (e) Memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian aset dan kewajiban pemerintah; (f) Sesuai Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Pemerintah, 2014).

Menurut KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintah), Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD (KSAP, 2015).

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Penerapan SAP berbasis akrual

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Standar Akuntansi berbasis akrual dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. Perubahan dari akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi akrual penuh membawa pengaruh terhadap pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan.

Dalam Akuntansi Pemerintah gambaran perkembangan operasi atau kegiatan dibuat dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus atau Defisit. Dengan ditetapkannya PP No. 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual telah memiliki landasan hukum. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 tidak banyak berbeda, keberadaan pos piutang, Aset Tetap, Hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Perbedaan PP No. 71 Tahun 2010 dengan PP No. 24 Tahun 2005, terkait dengan komponen laporan keuangan,

Tabel 2.1
KOMPONEN LAPORAN
KEUANGAN

PP No. 24 Tahun 2005 (Basis Kas menuju AkruaI)	PP No. 71 Tahun 2010 (Basis AkruaI)
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca	2. Laporan Perubahan SAL
3. Laporan Arus Kas	3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas	4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan.	5. Laporan Operasional
	6. Laporan Perubahan Ekuitas
	7. Catatan atas Laporan Keuangan

Sumber : (Ningtyas, 2015)

PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Dampak positif dari penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara signifikan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan. Penerapan SAP dalam menyajikan laporan keuangan disetiap pemerintah daerah wajib segera dilaksanakan. Adanya audit yang dilakukan BPK berperan

terhadap opini yang akan diberikan BPK atas laporan keuangan. dasar yang digunakan BPK dalam melakukan audit adalah SAP, sehingga penyusunan lapran keuangan harus berprinsip pada transparansi dan akuntabilitas. (Winylson, Langelo, & Paul, 2015)

Peranan Sumber Daya Manusia dalam penerapan SAP berbasis AkruaI.

Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi. Menurut Nawawi dalam Aldiani (2010) ada tiga pengertian tentang sumber daya manusia,

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi.
2. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal didalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.
3. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

Penerapan SAP berbasis akrual yang baik membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

Pemerintah daerah perlu mempersiapkan SDM yang handal serta memahami masalah penyusunan laporan keuangan dan sosialisasi SAP. Kompetensi SDM yang lemah dapat mengakibatkan kesalahan dalam memahami dan melaksanakan metode, teknik dan ketentuan yang terdapat dalam standar akuntansi pemerintah, sehingga laporan keuangan yang dibuat juga akan salah dan terlambat penyampaiannya. (Sudiarianti, 2015)

GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN

Profil BPKAD Kabupaten Jombang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur pendukung pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Tujuan dari BPKAD Kabupaten Jombang adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Visi dan Misi

VISI

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

MISI

Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penerapan SAP berbasis Akrual pada BPKAD Kab. Jombang

Akuntansi Keuangan di BPKAD Kabupaten Jombang merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah Kabupaten Jombang. BPKAD Kabupaten Jombang merupakan instansi yang bertindak sebagai Kantor Pusat dan yang bertindak sebagai Kantor Cabang adalah SKPD. BPKAD Kabupaten Jombang melakukan pelaporan keuangan satu tahun sekali, sebagai entitas pelaporan BPKAD membentuk tim yaitu pegawai dari bidang akuntansi sebagai konsolidator untuk membuat laporan keuangan Kabupaten Jombang.

Dalam laporan keuangan basis yang digunakan adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas. Penerapan basis akrual dilakukan dengan menyajikan informasi akrual untuk pendapatan dan belanja sebagai pelengkap LRA berbasis kas. Dalam menyajikan laporan keuangan BPKAD Kabupaten Jombang selaku entitas pelaporan menyajikan 7 komponen laporan keuangan.

Sistem akuntansi pada BPKAD Kabupaten Jombang dijalankan secara terkomputerisasi. Setiap hari ada pengelola keuangan dari SKPD lain yang datang, karena koneksi internet yang lambat sehingga tidak dapat mengakses aplikasi SIMDA Keuangan atau adanya transaksi yang tidak dimengerti oleh pengelola keuangan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu mengentri transaksi-transaksi akuntansi ke dalam aplikasi, sehingga secara otomatis akan menjurnal, memposting dan membentuk laporan keuangan. Aplikasi Keuangan menghubungkan sistem akuntansi pada SKPD kepada PPKD sehingga proses konsolidasi untuk pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih muda.

Analisis Penerapan SAP berbasis Akrual pada BPKAD Kab. Jombang

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa SAP yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah SAP berbasis akrual. Sesuai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual, pemerintah Indonesia harus menerapkan SAP berbasis akrual paling lambat 5 tahun sejak diterbitkannya PP Nomor 71 tahun 2010. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Gustina selaku Kasubid Akuntansi pada BPKAD menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang telah menerapkan Lampiran I PSAP 71 tahun 2010

sejak tahun 2015, sesuai dengan amanat pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam penerapan SAP berbasis akrual BPKAD kabupaten Jombang melakukannya secara bertahap.

Standar Akuntansi Pemerintah dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Penerapan SAP berbasis akrual diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan. BPKAD sendiri selaku entitas pelaporan wajib menyajikan 7 komponen laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Dalam penerapan SAP berbasis Akrual, laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. Laporan keuangan dikatakan akurat apabila informasi yang termuat didalamnya dapat dipahami dan dapat dipercaya. Dalam penerapan SAP berbasis Akrual laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kabupaten Jombang,

Menurut pendapat dari Ibu Gustina, sudah relevan salah satu karakteristiknya yaitu tepat waktu dalam pelaporannya. Sedangkan menurut Bapak Hendra, sudah akurat karena bersifat andal dan dapat dipercaya. Tetapi belum dikatakan relevan karena belum memenuhi karakteristik prediktif.

Penerapan SAP berbasis akrual telah mendukung pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan yang akuntabel. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Gustina,

“Kalau saya pikir SAP berbasis akrual sudah mendukung pemerintah untuk membuat laporan yang akuntabel, karena PP Nomor 71 tahun 2010 lampiran I sudah akrual murni. Istilahnya hampir setara dengan SAK cara kerjanya. Karena kita berada di lingkup pemerintahan, lingkup transaksinya terbatas dalam artian transaksinya ada yang tidak sama dengan SAK. Jadi dibuatlah PSAP lampiran I.”

Tantangan yang dihadapi BPKAD kabupaten Jombang untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan akurat, menurut pendapat Ibu Gustina yaitu,

“Jika kita berbicara selaku entitas pelaporan, tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya informasi yang disampaikan atau dimunculkan oleh masing-masing SKPD padahal dalam pelaporan keuangan harus kecukupan pengungkapannya. Menggali informasi dari teman-teman SKPD itu yang susah, karena meskipun sudah dijelaskan mereka hanya menyampaikan yang ada saja.”

Sedangkan menurut pendapat Bapak Hendra yaitu,

“Tantangannya yang pertama yaitu dimulai dari SDM atau pegawainya yang menganggap laporan keuangan hanya untuk sekedar pertanggungjawaban saja. Dari sini kita belajar setahun kemarin itu ada tidak manfaat laporan keuangan? tapi banyak pegawai yang tidak berfikir sedetail itu. Yang kedua yaitu perangkatnya, ada beberapa SKPD yang sistem online nya terganggu sehingga tidak dapat tersampung langsung dengan sistem yang ada di BPKAD.”

Manfaat dari penerapan SAP berbasis akrual yaitu dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah dan memberikan informasi yang sebenarnya atas kewajiban pemerintah. Sedangkan menurut Ibu Gustina yaitu,

“Manfaat dari penerapan SAP berbasis akrual yaitu, lebih menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Informasi yang dihasilkan lebih mendekati kenyataan bukan informasi yang semu. Misalnya: pengakuan pendapatan yang harusnya pendapatan untuk tiga tahun tetapi diakuinya sekarang. Belanjapun juga, belanja sewa untuk lima tahun karena dikeluarkannya tahun ini jadi diakuinya tahun sekarang padahal itu untuk lima tahun kedepan. Jadi sekarang menggunakan akrual, bisa kelihatan kondisi realnya untuk pendapatan sekian dan untuk belanja sekian.”

Sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan kendala yang dihadapi oleh BPKAD selaku entitas pelaporan, Ibu Gustina mengatakan bahwa:

“Karena mencakup banyak SKPD yang tidak memiliki pegawai atau tenaga akuntansi. Jadi sebagai konsolidator harus sabar dan telaten agar mereka dapat menyusun laporan keuangan paling tidak sesuai dengan SAP berbasis akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan terlihat mudah tetapi tidak semudah yang terlihat, karena banyak hal yang perlu di *adjustment* atau disesuaikan.”

Kendala lain yang disampaikan oleh Bapak Hendra dalam penyusunan laporan keuangan yaitu,

“Keterbatasan laporan keuangan, karena instansi pemerintah bukan seperti perusahaan dan juga tidak dapat terlepas dari unsur politik. Misalnya belanja modal di dinas pendidikan untuk pengadaan peralatan olahraga dari analisis persentasenya meningkat. Jadi tidak dapat diungkapkan pada laporan keuangan karena kita harus mempertimbangkan biaya dan manfaat yang dihasilkan atas kejadian tersebut.”

Mengenai aplikasi yang digunakan oleh BPKAD Kabupaten Jombang terkait Penerapan SAP berbasis akrual yaitu aplikasi SIMDA Keuangan. Meskipun masih sering mengalami gangguan, aplikasi tersebut masih terus diperbarui dan disesuaikan dengan SAP berbasis akrual. Untuk penggunaan SIMDA sendiri pemerintah mendukungnya dengan mengadakan BIMTEK untuk pelatihan aplikasi tersebut. Opini

yang dikeluarkan BPK terhadap laporan keuangan daerah yang di susun oleh BPKAD Kabupaten Jombang yaitu Wajar Tanpa Pengecualian 3 kali berturut-turut dari tahun 2015,2016 dan 2017 setelah menerapkan SAP berbasis akrual. Dapat dikatakan bahwa BPKAD Kabupaten Jombang telah berhasil menerapkan SAP berbasis akrual.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dilakukan sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi, tetapi strategi dalam penerapan SAP berbasis akrual pada BPKAD Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan baik.

Analisis Pemahaman Pegawai Bagian Akuntansi terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual pada BPKAD Kab. Jombang

Dalam penerapan SAP berbasis akrual pemahaman pegawai sangat diperlukan. Pegawai di BPKAD Kabupaten Jombang sudah memahami SAP berbasis akrual. Menurut Ibu Gustina selaku Kasubid Akuntansi menyatakan bahwa,

“Insyallah, pegawai bagian akuntansi di BPKAD sendiri sudah paham karena latar belakang pendidikannya adalah akuntansi.”

Sedangkan menurut pendapat Bapak Hendra yaitu,

“Yang di BPKAD selaku SKPD saja yang bisa saya jamin, untuk yang lain ya berdasarkan BIMTEK dan juga harus ada pendampingan.”

Dalam penerapan SAP berbasis akrual pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi memiliki peran penting. Berikut pendapat dari Ibu Gustina,

“Pegawai yang latar belakangnya akuntansi itu penting, karena gini bukan orang akuntansi pun bisa diajari, tapi kalau setiap tahun harus mengajari dengan dibandingkan orang yang sudah paham akuntansi kan lebih enak yang sudah paham. Alhamdulillah juga sudah terbantu dengan sistem, kalau kita memasukkan jurnal atau *adjustment* disitu *human error* nya kan besar. Padahal yang namanya jurnal menentukan debet kreditnya, akunnya apa kan krusial, laporan keuangan benar tidaknya kan tergantung jurnalnya. Kalau orangnya paham kan jadi mudah mengarahkannya. Tapi kalau enggak mengenal sama sekali ya kita harus ngajari satu-persatu.”

Untuk memahami SAP berbasis akrual pegawai bagian akuntansi di BPKAD kabupaten Jombang membutuhkan Pelatihan atau *workshop*, seperti yang diungkapkan Ibu Gustina,

“Setiap tahun BPKAD memberikan penyegaran ke teman-teman meskipun menyusun laporan keuangan setiap tahun, tapi juga stiap tahun kita tetap mengadakan BIMTEK. Karena kadang yang sudah mengerti dimutasi, yang lama juga kadang

lupa karena hanya satu tahun sekali. Jadi setiap tahun kita tetap melakukan BIMTEK. Awal-awal penerapan SAP berbasis akrual BKD juga memberikan *workshop* di Jogja satu minggu dengan narasumber BPK selama dua tahun berturut-turut. Jadi tetap ada *effort* dari PEMDA meskipun belum semua bagian penyusun laporan keuangan berlatar belakang akuntansi.”

Dalam penerapan SAP berbasis akrual ada beberapa kendala yang dihadapi pegawai bagian akuntansi, Ibu Gustina mengungkapkan selaku Kasibud Akuntansi,

“Untuk dasar akuntansi dan mekanisme pencairan, penatausahaan kan tidak berubah, yang berubah hanya dari sisi pelaporannya. Kendalanya pelaporan dengan mekanisme yang sama tetapi kita harus menyajikan secara akrual. Cuman yang berubah kan kita harus menambah laporan operasional, seperti Laporan Perubahan SAL. Untuk LRA kita menyajikan LRA akrual dengan nomor faktur yang sedikit berbeda dari LRA sebelumnya.”

Sedangkan kendala lain yang dihadapi pegawai bagian akuntansi menurut Bapak Hendra yaitu terkait dengan pegawai yang diharapkan setidaknya berlatar belakang pendidikan akuntansi dan mengerti mengenai akuntansi berbasis akrual.

Hal ini karena pada umumnya penempatan pegawai pengelola keuangan masih belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Ada SKPD yang pegawai bagian akuntansi atau keuangannya tidak berlatar belakang ekonomi atau akuntansi, sehingga pemahaman terkait penyusunan laporan keuangan yang lebih kompleks pun menjadi sangat terbatas.

Evaluasi Penerapan SAP berbasis Akrual pada BPKAD Kab. Jombang.

Dari analisis yang diungkapkan dapat diambil garis besarnya bahwa BPKAD Kabupaten Jombang telah menerapkan SAP berbasis akrual dengan kebijakan, sistem dan strategi yang matang sehingga berhasil melakukan penerapan SAP berbasis akrual dengan baik. Terbukti dengan diperolehnya opini WTP dari BPK 3 kali berturut-turut setelah penerapan SAP berbasis akrual.

Hal ini merupakan contoh yang baik dari sektor publik, bahwa setiap perubahan peraturan, pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat wajib melaksanakan peraturan baru yang dibuat karena adanya nilai kepatuhan terhadap hukum. Nilai kepatuhan hukum tersebut mendorong BPKAD Kabupaten Jombang untuk senantiasa berpedoman pada SAP yang berlaku yaitu SAP berbasis akrual.

Evaluasi Pemahaman Pegawai bagian Akuntansi terhadap Penerapan SAP berbasis Akrual pada BPKAD Kab. Jombang.

Berdasarkan analisis yang dilakukan tentang pemahaman pegawai bagian akuntansi terhadap penerapan SAP berbasis akrual dapat ditarik garis besarnya bahwa pegawai di BPKAD Kabupaten Jombang sudah memahami SAP berbasis akrual karena sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Selain itu dalam memahami SAP berbasis akrual setiap tahun BPKAD Kabupaten Jombang melakukan BIMTEK dan pendampingan untuk pegawai yang menyusun laporan keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam mengevaluasi Penerapan dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada BPKAD Kabupaten Jombang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. BPKAD Kabupaten Jombang telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi yang menyatakan bahwa BPKAD Kabupaten Jombang sudah menerapkan SAP berbasis akrual sejak tahun 2015 sesuai dengan Perundang-undangan.

BPKAD Kabupaten Jombang telah menyajikan 7 komponen laporan keuangan pemerintah daerah yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun menggunakan basis akrual.

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kabupaten Jombang dikatakan akurat karena informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan relevan karena sudah memenuhi kriteria tepat waktu dan lengkap dalam pelaporannya, tetapi tidak memiliki manfaat prediktif. Karena terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan yaitu, keterbatasan laporan keuangan dan kurangnya pegawai yang ahli dalam akuntansi.

Meskipun begitu BPKAD Kabupaten Jombang berhasil menerapkan SAP berbasis akrual, keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jombang.

2. Pegawai bagian akuntansi di BPKAD Kabupaten Jombang sudah memahami penerapan SAP berbasis akrual. Karena berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan setiap tahun dilakukan BIMTEK dan juga pendampingan untuk para pegawai.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Data yang didapat hanya berdasarkan wawancara, karena hanya ada dua narasumber dalam wawancara yang dilakukan yang mengakibatkan hasil wawancara hanya ditinjau dari dua sudut pandang saja, yaitu Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Kepala Sub Bidang Pengeluaran Kas BPKAD Kabupaten Jombang.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah daerah, seharusnya setiap SKPD di Kabupaten Jombang memiliki pegawai bagian akuntansi yang latar belakang pendidikannya akuntansi, agar memudahkan BPKAD Kabupaten Jombang dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Bagi BPKAD Kabupaten Jombang, untuk melakukan pengembangan terhadap aplikasi SIMDA Keuangan agar semudah mungkin dipahami oleh semua orang.
3. Bagi Penelitian selanjutnya, untuk melakukan penelitian terhadap kinerja laporan keuangan BPKAD Kabupaten Jombang setelah penerapan SAP berbasis akrual.

DAFTAR RUJUKAN.

- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2008). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Perundang-undangan Terbaru*. Semarang: Badang Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hoesada, j. (2015). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- IKAPI. (2009). *Standar Akuntansi Pemerintah* . Fokusmedia.
- KSAP. (2015, february 16). *Standar Akuntansi Pemerintah* . Wikiapbn : Sebuah Ensiklopedia Kementerian

Keuangan:

- <http://www.wikiapbn.org/standar-akuntansi-pemerintahan/>
- Margareta, W. A. (2015). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . *Kesiapan Instansi Pemerintah dalam Implementasi SAP berbasis Akrual* , 4, 3.
- Nordiawan, D., Putra, S., & Rahmawati, M. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah. (2014, maret 24). Peraturan pemerintah 71 tahun 2010.
- Sholihin, M.,& Ratmono, D. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akrual*Semarang/Jogjakarta : UPP STIM YKPN.
- sudiarianti, I. m. (2015). pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian internal pemerintah. *standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan* , 4-5.
- Wynylson, S., Langelo, F., & Paul, D. (2015). Analisis Penerapan SAP berbasis Akrual dalam penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3, 1-8.